



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKABUMI  
DENGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUKABUMI**

### TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA KABUPATEN  
SUKABUMI DAN KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 3671/6-PPKs/W/2019

Nomor : 510.8/01/Perj.Ks/BPBD/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-4-2019), bertempat di Kota Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si** : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/4973/Bkpsdm/2018 tanggal : 31 Juli 2018 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : 364/2690-KPI, tanggal 22 April 2019, berkedudukan di Jl. A.Yani No. 1 Palabuhanratu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ASEP SUHENDRAWAN, S.Sos** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821.23/KEP.98/BKPP, tanggal : 29 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil jabatan Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi (Eselon III.A) dilingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Sukabumi Nomor 510.8/01 /Ekbang & KD/2019, Tanggal 22 April 2019 berkedudukan Jl. Yulius Usman No. 2 Kota Sukabumi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KE KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan, perlu ditangani bersama oleh **PARA PIHAK**;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperlukan komitmen bersama dan keterpaduan langkah program dan kegiatan sehingga penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan dapat lebih sinergis, terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kejadian kebakaran menjadi bagian sub urusan wajib dari urusan wajib di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor 06/MoU/Ekbang & KD/2018 dan Nomor 006/Pj-75-hukham/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Kerjasama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;

10. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi 06/MoU/EkBang & KD/2018 dan Nomor 006/Pj-75-hukham/2018 tanggal 04/12/2018 tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut “perjanjian”, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatnya kerjasama penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, meliputi :
  - a. meningkatkan percepatan layanan dan kelancaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - b. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
  - c. meningkatkan sistem informasi manajemen pemadam kebakaran.

## **BAB II OBJEK**

### **Pasal 2**

Objek perjanjian adalah penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara bersama di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian ini, meliputi :

- a. penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan;
- b. pelaksanaan latihan bersama guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota pemadam;
- c. pelaksanaan Bawah Kendali Operasi (BKO) di luar wilayah perbatasan pada masing masing wilayah PARA PIHAK; dan
- d. data inventarisasi *hydrant* kota dan kantung kantung air untuk digunakan oleh **PARA PIHAK** saat penanggulangan kebakaran.

### **BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu**

#### **Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Wilayah Perbatasan**

#### **Pasal 4**

Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan, meliputi :

- a. pelaksanaan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung, pemukiman, industri, lahan dan lain-lain yang harus sesuai dengan koordinasi dari masing-masing wilayah;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pada situasi tertentu bila diperlukan; dan
- c. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Latihan Bersama**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan latihan bersama guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota pemadam, meliputi penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.



**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Bawah Kendali Operasi (BKO) di luar wilayah perbatasan**

**Pasal 6**

Pelaksanaan BKO di luar wilayah perbatasan pada masing-masing wilayah perbatasan, meliputi pengerahan BKO unit pemadam kebakaran dan/atau penyelamatan beserta kelengkapannya.

**Bagian Keempat**  
**Data Inventarisasi *Hydrant* Kota dan kantung-kantung air**

**Pasal 7**

Data inventarisasi hydrant kota dan kantung-kantung air untuk digunakan oleh **PARA PIHAK** saat penanggulangan kebakaran, meliputi :

- a. data hydrant kota yang berfungsi untuk *supply* air ke mobil unit kebakaran;
- b. data kantung air yang biasa dipergunakan saat kebakaran; dan
- c. mapping *hydrant* kota dan kantung-kantung air di masing-masing wilayah.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

(1) **PARA PIHAK** mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan prosedur tetap operasional yang telah disepakati bersama;
- b. mengirim dan menerima data-data kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani dan masuk wilayah kerja **PARA PIHAK**;
- c. memperoleh fasilitas dalam menjalin hubungan kemitraan;
- d. memperoleh fasilitas pelayanan administrasi bidang pemadam kebakaran; dan

(2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi tentang hal-hal yang akan menjadi potensi kurang baik terhadap pelayanan pemadam kebakaran di wilayah perbatasan;
- b. memberikan informasi terkait kegiatan pemadam kebakaran yang akan atau sedang dilaksanakan di wilayah perbatasan;
- c. menyusun prosedur tetap operasional yang dipergunakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. melakukan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## **BAB VIII EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap pelaksanaan perjanjian selanjutnya.

## **BAB IX PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

## **BAB X KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 13**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain :
- a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. banjir besar;
  - d. kebakaran besar;
  - e. tanah longsor;
  - f. wabah penyakit;



- g. pemogokan umum;
  - h. huru-hara;
  - i. sabotase; dan
  - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

## **BAB XI PERSELISIHAN**

### **Pasal 14**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## **BAB XII KORESPONDENSI**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/ pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

#### **DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKABUMI**

Alamat : JL A. Yani No. 1 Pelabuhanratu Kecamatan  
Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Telepon : +62-266 436 422 dan +62-266 434 263

Email : [sukabumikabdamkar@gmail.com](mailto:sukabumikabdamkar@gmail.com)

u.p : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten  
Sukabumi

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SUKABUMI**

Alamat : Jl. Yulius Usman No.2 Kota sukabumi  
Telepon : +62-222155  
Email : [Bppdkotasukabumi@yahoo.co.id](mailto:Bppdkotasukabumi@yahoo.co.id)  
u.p : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tidak berlaku sesuai dengan perjanjian ini.

### **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Hal-hal yang belum cukup dan/atau diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



A blue ink signature consisting of several vertical and horizontal strokes, ending with a small cross-like mark.

**ASEP SUHENDRAWAN, S.Sos**

PIHAK KESATU,



A blue ink signature that is more stylized and cursive than the one on the left, with a prominent loop at the end.

**Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si**